

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddique, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- _____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan, *et.al*, 2013, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bemmelen, Mr. J.M van, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak pidana korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- IGM. Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak pidana korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahfud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pramono, R Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Karya Nusantara, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarto, Suryono, 1991, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, United Nations, New York.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

International Covenant of Civil and Political Rights

United Nations Convention Against Corruption

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5602)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kode Etik Anggota DPR-RI

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pd/1989, perihal Saksi Mahkota,
Tanggal 2 Maret 1989

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437K/Pid.Sus/2011, perihal Saksi Mahkota,
Tanggal 7 Februari 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian
Definisi Saksi dalam KUHAP, Tanggal 8 Agustus 2010

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST

D. Jurnal

Hiariej, Eddy O.S, “Korupsi dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, Nomor VI, 2000.

Manalu, River Yohanes, “Justice Collaborator dalam Tindak pidana korupsi”, *lex crimen*, Vol. IV, Nomor 1, Jan-Maret, 2015

Mulyadi, Lilik. “Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 3, 2014

E. Hasil Penelitian

Charisma, Yosafat, 2016, *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hapsari, Maria Yudhitia Bayu, 2012, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Puspitasari, Galuh, 2017, *Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sagita, Ginia Tia, 2014, *Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak pidana korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Simatupang, Erika, 2017, *Implementasi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak pidana korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Sutanti, Rahmi Dwi, 2013, *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro, Semarang.

F. Internet

Badan Pusat Statistik,
<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=44>, diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 19.49 WIB.

Badan Pusat Statistik,
<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50>, diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 19.34 WIB.

Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2016: Presentasi Penduduk Miskin September 2016 Sebesar 10,70 Persen”,
https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170116093952.pdf,
diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 21.34 WIB

Badan Pusat Statistik, “Tabel Garis Kemiskinan Menurut Provinsi 2013-2017”,
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>, diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 20.03 WIB

Badan Pusat Statistik, “Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 1986-2017”, <https://www.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/981>,
diakses pada 1 Oktober 2017, pukul 19.33 WIB

Belarminus, Robertus, “Kasus E-KTP, KPK Ajukan banding Atas Putusan Irman dan Sugiharto”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/21014281/-kasus-e-ktp-kpk-ajukan-banding-atas-putusan-irman-dan-sugiharto>,
diakses pada 11 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB

Cahyono, Eddy, “Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”,
<http://setkab.go.id/pemerataan-kesejahteraan-rakyat/>, diakses pada 2
Oktober 2017 pukul 08.00 WIB

Gabrillin, Abba, “Hakim Tetapkan Damayanti Sebagai ‘Justice Collaborator’ ”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14172161/hakim.tetapkan.damayanti.sebagai.justice.collaborator.>, diakses pada 9 Oktober 2017 pukul
12.30 WIB

Gabrillin, Abba, “Meski ‘Justice Collaborator’, Dua Terdakwa E-KTP Divonis
Sama dengan Tuntutan”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/15534341/meski-justice-collaborator-dua-terdakwa-e-ktp-divonis-sama-dengan-tuntutan>, diakses
pada 11 Oktober 2017 pukul 08.14 WIB

Gabrillin, Abba, “Vonis Ringan Damayanti dan Pengungkapan Kasus Suap
Komisi V DPR”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/09344101/vonis.ringan.damayanti.dan.pengungkapan.kasus.suap.komisi.v.dpr>, diakses pada 9 Oktober
2017 pukul 14.00 WIB

Hukum Online, “Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator>, diakses pada 7 Oktober 2017
pukul 17.34 WIB

Karman, Yonky, “Indonesia Darurat Korupsi”,
<https://antiKorupsi.org/news/indonesia-darurat-Korupsi>, diakses pada
tanggal 4 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2016”,
<https://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2017-Laporan%20Tahunan%202016%20Kejaksan%20Republik%20Indonesia-id.pdf>, diakses pada 6 Oktober 2017, pukul 13.12 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2016”,
<https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>, diakses pada 6 Oktober 14.56 WIB

Lubis, Todung Mulya, “Korupsi Bukan Soal Jumlah”,
<https://antiKorupsi.org/news/Korupsi-bukan-soal-jumlah>, diakses pada
tanggal 4 Oktober, pukul 20.17 WIB

Marbun, Andreas Nathaniel, “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?”, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>, diakses pada 13 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB

Pradiptyo et all, “Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)”, http://cegahKorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf, diakses pada 5 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB.

Ronald, “Korupsi e-KTP dinilai berdampak ke berbagai persoalan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-e-ktp-dinilai-berdampak-ke-berbagai-persoalan.html>, diakses pada 6 April 2018 pukul 20.00 WIB

G. Artikel dalam Antologi dengan Editor

Hiariej, Eddy O.S, “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”, dalam Agustinus Pohan, *et.al*, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.

H. Makalah/Pidato

Fausto Zucarelli, “Handling and Protection Witnesses and Collaborations of Justice, the Italian Experience”, *Makalah*, International Seminar on the Protection of *Whistleblower* as Justice Collaborator, Jakarta, 9 Juli 2011.

Hiariej, Eddy O.S, “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”, *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2012.

Santosa, Mas Achamad, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)”, *Makalah*, International Workshop on The Protction of *Whistleblower* as Justice Collaborator, Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Sarwono, Djoko, “Reward Bagi “*Whistleblower*” (Pelapor Tindak Pidana) dan “*Justice Collaborator*” (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu”, *Makalah*, Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011